

RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL



2026

Badan Pangan Nasional

Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367

Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>

Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan revisi I Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang telah dilakukan penyesuaian sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 revisi I ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang mengalami penyesuaian kegiatan dan anggaran seiring dengan penugasan yang diberikan. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 revisi I ini memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional serta perkembangan kegiatan dan anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan Revisi ke-13 pada Triwulan II pada bulan April 2026.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 ini disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 revisi I ini menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan diharapkan dapat mendukung tata kelola sistem pangan menuju penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Jakarta, 24 April 2026
an. Kepala Badan Pangan Nasional
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi.....	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional ...	5
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	6
BAB III RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2026	17
3.1. Kebijakan dan Strategi	17
3.2. Anggaran.....	26
3.3. Target Kinerja.....	20
3.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026	28
BAB IV PENUTUP.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, dinamika pembangunan nasional menunjukkan adanya tekanan di sektor pangan yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk, perubahan iklim ekstrem, serta kejadian bencana alam yang berdampak pada kesenjangan ketersediaan pangan, gangguan produksi, kelancaran distribusi antarwilayah, dan stabilitas harga pangan. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya pangan yang besar, karakteristik geografis kepulauan dan sebaran penduduk yang tidak merata menuntut penguatan tata kelola sistem pangan yang terintegrasi guna menjamin ketersediaan pangan nasional, keterjangkauan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Badan Pangan Nasional berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian pangan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional ke-2 (PN2) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pencapaian PN2 didukung oleh Program Prioritas (PP) yaitu Swasembada Pangan dan Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular. Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN5 melalui PP Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dan PN7 melalui PP Pengendalian Inflasi.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima

pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu 1) Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional berupaya menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan sebagai institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan memantapkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan, meningkatkan penjaminan keamanan pangan, dan mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan dalam perencanaan, yang di dalamnya memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 dituangkan melalui Rencana Aksi Badan Pangan Nasional tahun 2026.

1.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 memuat 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026, kerangka regulasi, dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- g. pengembangan sistem informasi pangan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi

```

graph TD
    Kepala[Kepala] --- SekretariatUtama[Sekretariat Utama]
    Kepala --- Inspektorat[Inspektorat]
    Kepala --- DeputiBidangKetersediaanPangan[Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan]
    Kepala --- DeputiBidangKarawananPanganDanGizi[Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi]
    Kepala --- DeputiBidangPangekaragamanKonsumsiDanKeamananPangan[Deputi Bidang Pangekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan]
    Kepala --- PusatDataDanInformasiPangan[Pusat Data Dan Informasi Pangan]

    SekretariatUtama --- BiroPerencanaanKerjaSamaDanHubunganMasyarakat[Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat]
    SekretariatUtama --- BiroOrganisasiSumberDayaManusiaDanHukum[Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum]
    SekretariatUtama --- BiroKeuanganPengadaanDanUmum[Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum]

    BiroKeuanganPengadaanDanUmum --- BagianProtokolDanTataUsahaPimpinan[Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan]
    BiroKeuanganPengadaanDanUmum --- BagianRumahTanggaPengelolaanBarangMilikNegaraDanKearsipan[Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan]

    BagianProtokolDanTataUsahaPimpinan --- SubbagianProtokol[Subbagian Protokol]
    SubbagianProtokol --- SubbagianTataUsahaPimpinan[Subbagian Tata Usaha Pimpinan]

    DeputiBidangKetersediaanPangan --- DirektoratKetersediaanPangan[Direktorat Ketersediaan Pangan]
    DirektoratKetersediaanPangan --- DirektoratStabilisasiPasokanDanHargaPangan[Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan]
    DirektoratStabilisasiPasokanDanHargaPangan --- DirektoratDistribusiDanCadanganPangan[Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan]

    DeputiBidangKarawananPanganDanGizi --- DirektoratPengendalianKerawananPangan[Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan]
    DirektoratPengendalianKerawananPangan --- DirektoratKewaspadaanPangan[Direktorat Kewaspadaan Pangan]

    DeputiBidangPangekaragamanKonsumsiDanKeamananPangan --- DirektoratPangekaragamanKonsumsiPangan[Direktorat Pangekaragaman Konsumsi Pangan]
    DirektoratPangekaragamanKonsumsiPangan --- DirektoratPerumusanStandarKeamananDanMutuPangan[Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan]
    DirektoratPerumusanStandarKeamananDanMutuPangan --- DirektoratPengawasanPenerapanStandarKeamananDanMutuPangan[Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan]
  
```

Ket : — Jalur Komando, Jalur Koordinasi

Sumber : Perbadan Nomor 2 Tahun 2025 dan Perbadan Nomor 7 Tahun 2024

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

6

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Hasil pengukuran masing-masing IKSS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
SS1	Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Inflasi Harga Bergejolak	0,12	3 - 5	6,21	75,8	Cukup
SS2	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	4,02	3,75	4,0	93,33	Sangat Baik
SS3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	93,5	94,0	95,1	101,17	Sangat Baik
SS4	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Indeks Keamanan Pangan Segar	60,0	61,0	62,11	101,82	Sangat Baik
SS5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	Nilai Reformasi Birokrasi	66,89	73,0	73,45	103,36	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						95,09	Sangat Baik

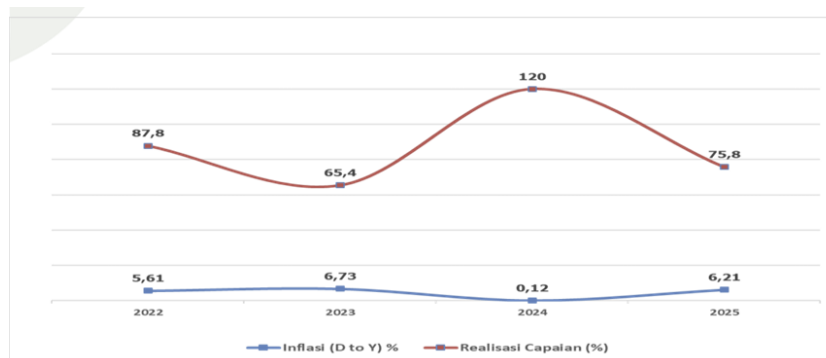
Sumber: Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 sebesar **95,09 persen atau kategori Sangat Baik**. Capaian kinerja sasaran strategis 2025 ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian tahun 2023 sebesar Rp92,87% dan mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 sebesar 97,99%. Keberhasilan capaian kinerja Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak

Indikator ini menggambarkan situasi Inflasi dalam hal ini *Volatile Food (VF)* atau inflasi harga bergejolak pada Tahun 2025 (*y-on-y*). Indikator ini dihitung dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan melalui Berita Resmi Statistik. Inflasi menggambarkan kondisi kenaikan harga secara terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi Harga Bergejolak digunakan secara luas oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan baik secara nasional maupun daerah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 5 Januari 2026, inflasi harga bergejolak (*m-on-m*) bulan Desember 2025 sebesar 2,74%, sedangkan inflasi harga bergejolak (*y-to-y*) sebesar 6,21%. Penyumbang inflasi harga bergejolak pada 2025 antara lain disebabkan oleh cabai merah, ikan segar, cabai rawit, bawang merah, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Sesuai target yang ditetapkan tahun 2025, inflasi harga bergejolak adalah sebesar 3-5% dengan realisasinya adalah sebesar **6,21%** sehingga berdasarkan perhitungan *stabilize target* maka capaian kinerja **75,80%** kategori **Cukup Baik**. Indikator inflasi harga bergejolak ini merupakan indikator yang telah digunakan pada periode sebelumnya dalam menjaga harga pangan, dengan perkembangan dari tahun 2022 sampai dengan 2025 sebagai berikut:



Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi dan Realisasi Capaian Tahun 2022 - 2025

Dalam rangka pengendalian inflasi harga di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis agar inflasi sesuai target tetap sesuai target antara lain.

- a) Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- b) Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
- c) Memperkuat system informasi pangan dan monitoring secara rutin melalui panel harga pangan untuk memantau perkembangan harga pangan dan melakukan intervensi terhadap komoditas dengan harga di atas HPP/HAP/HET di Tingkat produsen dan konsumen.
- d) Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.
- e) Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

IKSS2. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale (FIES)*

Indikator ini masih menjadi IKU pembangunan pangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan pangan berkelanjutan untuk pengentasan kelaparan. Sumber data FIES diperoleh dari BPS dengan cara penghitungan capaian sesuai manual IKU metode perhitungan *minimize target*. Realisasi tahun 2025 sebesar 4,00 atau 93,33 % dari target 3,75. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 (4,02), tahun 2023 (4,5), tahun 2022 (4,85), tahun 2021 (4,79) dan tahun 2020 (5,12). Angka capaian tersebut masih di bawah target (sebesar 3,75).

Skala FIES adalah alat ukur akses pangan pada tingkat individu atau rumah tangga dengan pencapaian skor FIES mengukur tingkat keparahan kerawanan pangan berdasarkan respon terhadap pertanyaan tentang kendala dalam mendapatkan pangan yang memadai. Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. FIES dilakukan berdasarkan pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan, sehingga indikator ini sensitif terhadap dinamika sosial ekonomi, daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan efektivitas intervensi perlindungan sosial.

Capaian indikator Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) tahun 2025 sebesar 93,33% masuk kategori Sangat Baik, seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis-2: FIES Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,75	4	93,33	Sangat Baik

Indikator FIES merupakan salah satu indikator RPJMN Tahun 2020-2024 dan masih berlanjut menjadi indikator di RPJMN Tahun 2025-2029. Badan Pangan Nasional diberi amanat untuk mengampu pencapaian indikator kinerja ini sejak tahun 2022. Jika dilihat dari perkembangan data sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2025, realisasi indikator ini belum dapat mencapai target RPJMN, sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Gambar 2.3. Perkembangan Angka FIES Tahun 2017 - 2025

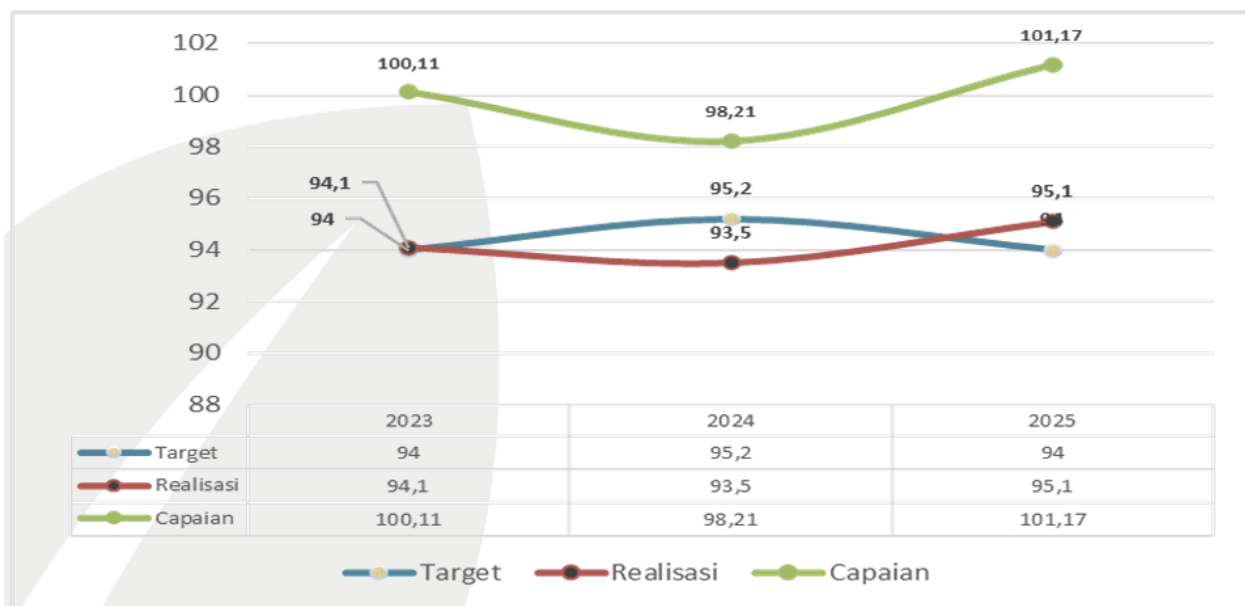
Dalam rangka memperbaiki capaian indikator ini di tahun-tahun mendatang, rencana perbaikan strategis yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Penguatan ketepatan sasaran intervensi, melalui pemanfaatan data SKPG, PoU, FIES, dan FSVA untuk penentuan lokasi dan kelompok prioritas secara lebih presisi;
- b. Integrasi program pusat-daerah, dengan memperkuat sinergi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program ketahanan pangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Perluasan cakupan dan intensitas intervensi stabilisasi pasokan dan harga, terutama di wilayah dengan volatilitas harga tinggi dan tingkat kerawanan pangan kronis;
- d. Penguatan sistem logistik dan distribusi pangan, termasuk optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pengembangan hub pangan regional, dan penguatan konektivitas distribusi ke wilayah 3T;
- e. Peningkatan efektivitas bantuan pangan, melalui perbaikan mekanisme penyaluran, kualitas komoditas, dan penguatan monitoring dampak terhadap konsumsi dan ketahanan pangan rumah tangga;
- f. Penguatan edukasi dan perubahan perilaku konsumsi, melalui kampanye masif pencegahan food loss and waste, B2SA, serta integrasi literasi pangan ke dalam pendidikan formal dan nonformal;
- g. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi, dengan penguatan sistem dashboard pangan nasional, pelaporan berbasis digital, dan evaluasi berkala berbasis outcome (penurunan FIES); dan
- h. Penguatan kolaborasi multipihak, melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan intervensi dan inovasi program.

IKSS3. Skor PPH Konsumsi

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar, yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Angka Kecukupan Gizi ditentukan melalui WNPG XI tahun 2018 yang menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilokalori/kapita/hari dan 57 (lima puluh tujuh) gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut diterjemahkan dalam satuan menjadi volume jenis pangan atau kelompok pangan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan selanjutnya dianalisis oleh Badan Pangan Nasional, diperoleh skor PPH pada tahun 2025 sebesar **95,1** atau 101,17 persen dari target 2025 sebesar 94 dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian indikator skor PPH konsumsi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 dan 2024 sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Gambar 3.3 Capaian Indikator Skor PPH Tahun 2023 – 2025

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan pola konsumsi pangan kedepan sebagai berikut;

1. Sosialisasi, promosi dan edukasi konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman terutama konsumsi hewani dan vitamin mineral yang terjangkau dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi protein.

2. Penguatan UMKM Pangan Lokal dengan memberikan insentif untuk UMKM pangan lokal;
3. Promosi massif melalui media sosial dan komunitas lokal;
4. Koordinasi lebih efektif dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk peningkatan akses pangan bergizi;
5. Pelibatan pemerintah daerah pada wilayah dengan skor PPH rendah melalui program insentif khusus; dan
6. Mendorong dan Meningkatkan peran aktif swasta dan dunia usaha serta peran perguruan tinggi

IKSS4. Indeks Keamanan Pangan Segar

Indeks Keamanan pangan Segar merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat penerapan sistem keamanan pangan segar berdasarkan berbagai aspek pengawasan dan pengendalian pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, menilai penerapan standar keamanan pangan segar, menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan, serta membandingkan capaian antar waktu maupun antarwilayah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi indikator ini secara nasional sebesar 62,11. Realisasi tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 61, dengan capaian sebesar 101,82% (kategori Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penjaminan keamanan pangan segar secara nasional telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target pembangunan yang direncanakan. Namun demikian, mengingat bahwa skor IKPS maksimal adalah 100, maka pencapaian skor 62,11 menggambarkan bahwa situasi keamanan pangan segar secara nasional berada pada tingkat menengah dari kondisi ideal, yang masih memerlukan pengembangan dan penguatan sistem pengawasan keamanan pangan segar. Pencapaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai indeks yang lebih tinggi dibanding tahun 2024 yaitu 60,00, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pengawasan keamanan pangan segar secara menyeluruh.

Dalam rangka pencapaian target pada periode berikutnya sesuai Rencana Strategis 2025 – 2029, di mana target 2029 sebesar 65, diperlukan beberapa upaya yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM pengawas keamanan pangan melalui pelatihan teknis dan sertifikasi, agar ketersediaan SDM yang terlatih dapat mendukung

upaya penjaminan keamanan pangan sekaligus menyumbang peningkatan skor kelembagaan;

2. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre-market dan post-market melalui koordinasi OKKP Pusat dan OKKP daerah guna kualitas memastikan keamanan pangan segar;
3. Penguatan infrastruktur laboratorium dan sarana pengujian untuk memperluas cakupan sampling;
4. Edukasi dan pendampingan pelaku usaha serta masyarakat tentang praktik penanganan pangan segar yang baik untuk mengurangi cemaran pada pangan, diantaranya adalah residu pestisida, logam berat, dan mikotoksin, serta mendorong agar perilaku sanitasi masyarakat lebih baik; dan
5. Penguatan jejaring lintas sektor dan kelembagaan, khususnya dalam berbagi data hasil pengujian dan registrasi dengan Kementerian teknis terkait.

IKSS5. Nilai Reformasi Birokrasi

Pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pangan Nasional bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yaitu: “Menjadi Institusi Yang Andal Dalam Tata Kelola Sistem Pangan Nasional Untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Nilai RB ini diberikan oleh Kementerian PANRB atas upaya Badan Pangan Nasional dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai *good governance*. Capaian Nilai RB mengacu pada: 1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB; dan 2) Kepmen PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Evaluasi RB berfokus pada RB Tematik dan RB General, mengukur dampak nyata, serta memastikan perbaikan berkelanjutan dengan prinsip dinamis, holistik, dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil penilaian RB Badan Pangan Nasional yang diakses melalui <https://www.portalrb.id/> untuk menu Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB diperoleh Nilai RB Tahun 2025 sebesar 75,45 lebih rendah dari hasil evaluasi internal RB yang dilakukan oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional diperoleh Nilai RB sebesar 76,30 berdasarkan Surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 106/PW.02.05/A.4/01/2026 per tanggal 28 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi Internal RB Badan Pangan Nasional Tahap Pelaksanaan (On Going) Triwulan IV Tahun 2025. Terdapat perbedaan sebesar 0,85 poin

antara penilaian Nilai RB yang dilakukan eksternal oleh Menteri PANRB dengan penilaian Nilai RB yang dilakukan internal oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional, dengan realisasi tahun 2025 adalah 75,45 dengan capaian sebesar 103,35% dari target sebesar 73 dengan kategori Sangat Baik.

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar 75,45 naik dibanding nilai Tahun 2024 sebesar 66,89, yang merupakan nilai baseline awal dan menjadi titik awal dalam menilai ketercapaian target RB pada periode jangka menengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

1. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru, sehingga pelaksanaan RB masih berada pada tahap pembentukan dan penguatan sistem, termasuk penyesuaian struktur, proses bisnis, dan tata kelola internal;
2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga evaluator (K/L meso) pada beberapa indikator RB masih perlu diperkuat agar pemenuhan evidence dan mekanisme penilaian dapat berjalan lebih optimal; dan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, yang berdampak pada efektivitas implementasi RB pada beberapa area penilaian.

Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 masih jauh dari target, di mana target 2029 adalah 85. Dengan masih adanya gap tersebut, masih diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan RB, khususnya pada aspek-aspek yang menjadi fokus perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, antara lain peningkatan kualitas rencana aksi RB, penajaman indikator dan target agar lebih terukur dan relevan, serta penguatan pengawalan pelaksanaan RB secara konsisten di seluruh unit kerja.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai RB yang lebih baik di masa mendatang, antara lain:

1. Penyempurnaan Rencana Aksi (General dan tematik) dengan melakukan penyempurnaan rencana aksi RB General dan RB Tematik dengan menekankan penajaman indikator dan target yang lebih relevan, terukur, serta berbasis kondisi awal (baseline).
2. Penguatan Mekanisme Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan RB dengan melakukan penguatan pengawalan dan pemantauan pelaksanaan RB melalui evaluasi berkala (triwulanan) yang dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal.
3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan, dengan menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi RB sebagai dasar dalam

melakukan penyesuaian aktivitas, perbaikan rencana aksi, serta penguatan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan RB.

4. Penguatan Peran Unit Kerja dan APIP, dengan memperkuat peran unit kerja pelaksana RB serta APIP dalam melakukan pendampingan, revidi, dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Aksi RB yang bertujuan memperbaiki pelaksanaan RB berjalan sesuai ketentuan, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

BAB III RENCANA AKSI

BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2026

3.1. Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk berkontribusi terhadap 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (FEW *Nexus*) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

2. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

3. PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025 2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini juga telah selaras dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Succes Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - b. pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - c. penguatan cadangan pangan nasional;
 - d. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 - e. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan

pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS 2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
 - a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. mitigasi potensi krisis pangan;
 - c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - d. penyaluran bantuan pangan terfortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS 3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - b. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - c. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
 - d. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
 - e. Penguatan data situasi konsumsi pangan.
4. SS4: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 - a. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan pangan segar;
 - b. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
 - c. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 - d. pengawasan keamanan dan mutu pangan di *pre market* dan *post market*; dan
 - e. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan.
5. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS 5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, dengan strategi:
 - a. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
 - b. penguatan sistem pengawasan internal;
 - c. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
 - d. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;

- e. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
- f. penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

3.2. Target Kinerja

Penyusunan target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2026 didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Sasaran Strategis dan target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2026	Satuan
SS 1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1. Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
SS 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS 2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	3,6	%
SS 3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3. Skor PPH konsumsi	94,5	Skor
SS 4. Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSS 4. Indeks keamanan pangan Segar	62	%
SS 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS 5. Nilai RB	81	Nilai

Sumber: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional *dicascading* menjadi Sasaran Program Unit Kerja Eselon I sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2. Sasaran Program dan Target Unit Kerja Eselon I
Badan Pangan Nasional Tahun 2026**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahun 2026	Satuan	Pengampu
SP 1. Terpenuhinya ketersediaan pangan	IKSP 1. Skor PPH ketersediaan	97,51	Skor	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	IKSP 2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	30	%	
SP 2. Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah antar waktu	IKSP 3. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	17,5-22,5	%	
SP 3. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP 4. Persentase daerah rentan rawan pangan	11	%	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
SP 4. Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP 5. Persentase pangan yang terselamatkan	3,5	%	
SP 5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi	IKSP 6. Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	1,00	%	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	IKSP 7. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%	
	IKSP 8. Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	5,00	%	
SP 6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP 9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	90	%	
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	77	Nilai	Sekretariat Utama
	IKSP 11. Opini BPK	WTP	Predikat	

Sumber: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Program Unit Kerja Eselon I Badan Pangan Nasional *dicascading* menjadi Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Sasaran Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Satuan	Pengampu
SK 1. Terpenuhi kebutuhan pangan	IKSK 1. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	115	%	Direktorat Ketersediaan Pangan
SK 2. Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	IKSK 2. Rasio pemenuhan cadangan beras pemerintah terhadap target	85	%	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
	IKSK 3. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	3,0-3,5	Juta Ton	
SK 3. Terkendalnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	IKSK 4. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	17,5-22,5	%	Direktorat Stabiliisasi Pasokan dan Harga Pangan
SK 4. Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	IKSK 5. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	60	%	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
SK 5. Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	IKSK 6. Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	30	%	Direktorat Kewaspadaan Pangan
SK 6. Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	IKSK 7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	90	%	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
	IKSK 8. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	40	%	
SK 7. Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	IKSK 9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	83	%	Direktorat Kewaspadaan Pangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Satuan	Pengampu
SK 8. Tercapainya konsumsi pangan masyarakat	IKSK 10. Konsumsi buah dan sayur	247,78	Gr/kap/hari	Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan
	IKSK 11. Konsumsi Pangan Hewani	131,7	Gr/kap/hari	
	IKSK 12. Konsumsi umbi-umbian	56,07	Gr/kap/hari	
SK 9. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK 13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	57,5	%	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 10. Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK 14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	71,9	%	
SK 11. Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran	IKSK 15. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	90,5	%	pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
SK 12. Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	IKSK 16. Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	3,0	%	
SK 13. Terwujudnya layanan Perencanaan yang baik	IKSK17. Indeks Perencanaan Pembangunan	83,5	Nilai	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas
SK 14. Terpenuhi Layanan	IKSK 18. Persentase Kerja Sama bidang pangan yang ditindaklanjuti	100	%	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Satuan	Pengampu
Kerjasama Bidang Pangan				
SK 15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK 19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	3,64	Skal Likert	
SK 16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	91	Nilai	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum
	IKSK 21. Indeks sistem merit	275	Nilai	
	IKSK 22. Indeks reformasi hukum	92	Nilai	
SK 17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK 23. IKPA	94,60	Nilai	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
	IKSK 24. Indeks Pengelolaan Aset	3,79	Indeks	
	IKSK 25. Indeks tata Kelola pengadaan	63,25	Indeks	
	IKSK 26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum	3,40	Skala	
SK 18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	100	%	Pusat Data dan Informasi Pangan
	IKSK 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	100	%	
SK 19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK 29. Tingkat Maturitas SPIP	3	Level	Inspektorat

Sumber: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Dari keseluruhan target kinerja Badan Pangan Nasional, terdapat 13 indikator yang merupakan cascading langsung kepada Badan Pangan Nasional dari RPJMN 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4. Indikator yang Diampu Badan Pangan Nasional pada RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Status	Target	
				2025	2029
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP: Swasembada Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	97,3 94	98,3 96
	KP Penguatan Cadangan Pangan	3. Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	Juta ton	3 – 3,5	3 – 3,5
	KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan	4. Konsumsi buah dan sayur 5. Konsumsi pangan hewani 6. Konsumsi umbi-umbian	gr/kap/har	245,33 129,11 53,40	255,29 139,76 64,91
	KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	7. Indeks Keamanan Pangan Segar	indeks	61	65
	KP Biofortifikasi dan fortifikasi pangan	8. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	20	100
	KP Penanganan Kerawanan Pangan	9. Persentase Wilayah Rentan Rawan Pangan (%)	%	11,5	9,5
		10. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,75	3,36
	PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular				
	KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	11. Persentase Pangan yang terselamatkan	%	3-5	3-5
PN 5: Melanjutkan	PP:Peningkatan Perdagangan				

Prioritas Nasional	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Status	Target	
				2025	2029
Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri.	Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global				
	KP Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	12. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	20-25	10-15
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	PP Pengendalian Inflasi				
	KP Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	13. Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5%	3-5%

3.3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2026, Badan Pangan Nasional dialokasikan anggaran bersumber Rupiah Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-125.01-0/2026 yang terbit tanggal 1 Desember 2025 total Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2026 adalah sebesar Rp233.294.603.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Berdasarkan perkembangan penugasan yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional, sampai dengan Revisi ke-13 Bulan April 2026, pagu anggaran Badan Pangan Nasional menjadi Rp21.982.770.235.000 (Dua puluh satu triliun Sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: 1) alokasi anggaran Satker Pusat

sebesar Rp21.964.886.244.000,00; dan 2). Alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi sebesar Rp17.883.991.000,00.

Penambahan pagu anggaran tersebut dilakukan dalam rangka penyelesaian pembayaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024 dan Pelaksanaan Penyaluran CPP Tahun 2026. Alokasi penambahan pagu digunakan untuk:

1. Penyaluran Bantuan Pangan Beras Februari-Maret Tahun 2026 sebesar Rp11.436.375.552.000;
2. Penyaluran Bantuan Pangan Minyak Goreng Februari-Maret Tahun 2026 sebesar Rp1.956.090.329.000;
3. Biaya Distribusi Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Februari-Maret Tahun 2026 sebesar Rp681.862.752.000;
4. Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam Tahun 2026 sebesar Rp1.204.031.500.000;
5. SPHP Beras Tahun 2026 sebesar Rp4.978.583.507.000;
6. SPHP Jagung Tahun 2026 sebesar Rp677.785.737.000;
7. Pembayaran Pending Matters Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp854.633.000.

Secara rinci alokasi anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2026 per Program per Kegiatan per Satker dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Per Program Per Kegiatan Per Kewenangan
Tahun 2026 (Revisi ke-13)

Kode	Program/Kegiatan	Pusat (Rp000)	Daerah (Rp000)	Total (Rp000)
125.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	21.843.137.140	15.995.066	21.859.132.206
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	21.814.351.595	6.933.005	21.821.284.600
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	13.675.185	1.467.900	15.143.085
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	15.110.360	7.594.161	22.704.521
125.WA	Program Dukungan Manajemen	121.749.104	1.888.925	123.638.029
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	121.749.104	1.888.925	123.638.029
	- Gaji dan Tunjangan (001)	74.160.617	-	74.160.617
	- Operasional Perkantoran (002)	18.204.080	-	18.204.080
	- Dukungan Manajemen teknis lainnya	29.384.407	-	29.384.407
	- Pembinaan Pemerintah Daerah	-	1.888.925	1.888.925
Total		21.964.886.244	17.883.991	21.982.770.235

3.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Setelah DIPA Induk terbit tanggal 1 Desember 2025, Badan Pangan Nasional menyusun Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menunjukkan komitmen pimpinan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang disepakati secara lebih transparan dan menjunjung prinsip akuntabilitas. Pada tabel di bawah ini disajikan penetapan hasil kerja untuk masing-masing unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rencana Aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

1. Direktorat Ketersediaan Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres	Progres	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			Parsial	Kumulatif					
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan	115%							
1	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40 Rekomendasi							Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan
1	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Nasional dan Wilayah	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi				
2	Penyusunan Rekomendasi Ekspor dan Impor	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi				
3	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Daerah	38 Rekomendasi				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	14 Rekomendasi	
2	NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK							NSPK Ketersediaan Pangan
1	Penyusunan NSPK Neraca Pangan/NBM	2 NSPK				2 NSPK			
2	Penyusunan NSPK Ekspor dan Impor Pangan	2 NSPK				2 NSPK			
3	Penyusunan NSPK Monitoring Stok Pangan	2 NSPK				1 NSPK	1 NSPK		
3	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3 Data							Data dan Informasi Ketersediaan Pangan
1	Penguatan Data dan Informasi Neraca Pangan							1 Data	
2	Pengelolaan Neraca Bahan Makanan							1 Data	
3	Penguatan Data Ketersediaan Pangan							1 Data	
4	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	4 Kegiatan							Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan
1	Sosialisasi Neraca Pangan dan NBM	1 Kegiatan				1 Kegiatan			
2	Bimtek Ketersediaan Pangan	1 Kegiatan				1 Kegiatan			
3	Monitoring Ekspor dan Impor Pangan	1 Kegiatan					1 Kegiatan		
4	Pengawasan Ketersediaan Pangan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	

2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progre	Progres	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			Parsial	Kumulatif	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
			[%]	[%]					
1	Rasio Perubahan Harga di Tingkat Produsen dan Konsumen Terhadap HPP/HET/HAP	17,5-22,5%							
1	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 Rekomendasi							Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan
1	FGD SPHP	3 Rekomendasi			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	
2	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 NSPK							NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
1	Penyusunan Regulasi Kebijakan SPHP (HPP, HET, HAP, dan/atau Kebijakan Lainnya)	1 NSPK						1 NSPK	
3	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 Data						10 Data	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan
1	Panel Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Panel Harga Pangan								
2	Pengembangan Panel Harga Pangan								
3	Pengembangan Aplikasi Kios Pangan								
4	Pengembangan Aplikasi Si Gempur								
4	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2 Kegiatan							Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi
1	Apresiasi Kinerja Pelaku Pangan dalam Mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Kegiatan							
2	Bimtek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan	
5	Pangan Yang Terdistribusi	900 Ton/45 Kelompok							Fasilitasi Distribusi Pangan
1	Fasilitasi Distribusi Pangan	45 Kelompok Masyarakat			11 KM	1 KM	18 KM	15 KM	
6	Gerakan Pangan Murah Yang Dilaksanakan	38 Daerah/Kelompok							Gerakan Pangan Murah Yang Dilaksanakan
1	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Pusat	1 Kegiatan						1 KM	
2	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Daerah	37 Kegiatan			9 Kegiatan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	9 Kegiatan	
7	Kios Pangan Yang Dikembangkan	1 Daerah/Kelompok							Kios Pangan Yang Dikembangkan
1	Pengembangan Kios Pangan	1 Kelompok Masyarakat						1 KM	
8	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2 Unit							Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
1	Pengadaan Mobil Pengendalian Inflasi dan SPHP	2 Unit						2 Unit	

3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Rasio Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah Terhadap Target	85%							
1	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	4 NSPK			1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan
1	Penyusunan Regulasi Cadangan dan Distribusi Pangan	4 NSPK							
2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39 Kegiatan						1 Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan
1	Koordinasi Penguatan CPN Lintas K/L								
2	Monev dan Pendampingan Penguatan Cadangan Pangan Nasional								
3	Penguatan Pengelola CPN (CPPD dan CPM)								
4	Penguatan Jejaring Bisnis untuk Pengelola Komoditas Pangan Perishable								
5	Pembangunan Model Distribusi Pangan								
6	Advokasi dan Koordinasi Cadangan Pangan Pemerintah								
7	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	38 Provinsi				12 Provinsi	14 Provinsi	12 Provinsi	
1	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	3,0-3,5 Juta Ton							
1	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan
1	Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan								
2	Analisis Potensi Pengembangan Pangan Lokal untuk Cadangan Pangan								
3	Analisis Model Close Loop Penyelenggaraan CPP								
4	Evaluasi Mekanisme Penyaluran CPP untuk Menghadapi Kebencanaan								
2	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1 Data						1 Data	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan
1	Penguatan Database Cadangan Pangan Nasional								

4. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres	Progres	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			Parsial [%]	Kumulatif [%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Wilayah	60%							
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39 Rekomendasi							Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan
1	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pusat	1 Rekomendasi					1 Rekomendasi		
2	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah	38 Rekomendasi				14 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	
2	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	2 NSPK							NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan
1	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	2 NSPK				1 NSPK	1 NSPK		
3	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Data							Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan
1	Penyusunan Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Data						1 Data	
4	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Kegiatan							Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan
1	Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan					1 Kegiatan			
2	Koordinasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi							1 Kegiatan	
2	Rasio Pemanfaatan Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	90%							
1	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	15500 Keluarga							Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
1	Intervensi pengendalian Kerawanan Pangan	11500 Keluarga					11500 Keluarga		
2	Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan	4000 Keluarga				4000 Keluarga			
3	Persentase Beras Fortifikasi Dalam Program Bantuan Pangan	40%							
1	Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi	960 Keluarga							Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi
1	Penyaluran Bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi	960 Keluarga					960 Keluarga		

5. Direktorat Kewaspadaan Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	30%							
1	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1 Rekomendasi							Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1 Rekomendasi						1 Rekomendasi	
2	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data							Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
1	Penyusunan Data Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data						1 Data	
2	Rasio Pemanfaatan Pangan Yang Diselamatkan	83%							
1	Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan	21 Kegiatan							Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan
1	Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan Pusat	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
2	Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan Daerah	20 Kegiatan				5 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	
2	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data							Data dan Informasi Penyelamatan Pangan
1	Piloting Perhitungan Sisa Pangan	1 Data						1 Data	
3	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	3 Unit							Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan
1	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3 Unit					3 Unit		
4	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan	1 Rperpres							RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan
1	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan	1 Rperpres						1 Rperpres	

6. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO	Status
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Konsumsi Buah dan Sayur	247,78 gr/kap/hari								
1	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2 Kegiatan							Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
	1 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1 Kegiatan			1 Kegiatan					
	2 Koordinasi Kedepkatan dalam rangka Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1 Kegiatan			1 Kegiatan					
2	Promosi Pangan B2SA	1 Kegiatan							Promosi Pangan B2SA	
1	Promosi Konsumsi Pangan B2SA	1 Kegiatan			1 Kegiatan					
2	Konsumsi Pangan Hewani	131,70 gr/kap/hari								
1	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	76 Kelompok							Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	
	1 Pendampingan Rumah Pangan B2SA	1 Kelompok			1 Kelompok					
	2 Pendampingan Rumah Pangan B2SA Daerah	75 Kelompok				25 Kelompok	40 Kelompok	10 Kelompok		
2	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 Data							Data Situasi Konsumsi Pangan	
1	Penyusunan Analisis Situasi Konsumsi Pangan	1 Data						1 Data		
3	Konsumsi Umbi-Umbian	56,07 gr/kap/hari								
1	UMKM Pangan Lokal Yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	10 UMKM							UMKM Pangan Lokal Yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	
	1 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan	10 UMKM					7 UMKM	3 UMKM		
2	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2 NSPK							NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
1	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2 NSPK						2 NSPK		

7. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	57,5%							
1	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	4 Rekomendasi							Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan	4 Rekomendasi			2 Rekomendasi		2 Rekomendasi		
2	NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1 NSPK							NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
1	Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1 NSPK				1 NSPK			
2	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	71,9%							
1	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4 Kegiatan							Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan
1	Koordinasi, Kerjasama, Advokasi, Bimtek, Sosialisasi, dan KIE di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan Pusat	3 Kegiatan			1 Kegiatan	2 Kegiatan			
2	Koordinasi Kedeputan di Bidang Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	
2	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	74 Lembaga							Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat	15 Lembaga				6 Lembaga	9 Lembaga		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	59 Lembaga				20 Lembaga	20 Lembaga	19 Lembaga	

8. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO	Status
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	90,5%								
1	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	39 Laporan							Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	
1	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan Pusat	1 Laporan			1 Laporan					
2	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan Daerah	38 Laporan					19 Laporan	19 Laporan		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	11 Lembaga							Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	
1	Pendampingan Pasar Pangan Segar Aman	11 Lembaga				11 Lembaga				
3	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	5 Unit								
1	Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan	5 Unit						5 Unit		
4	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	2 Kegiatan								
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan	1 Kegiatan				1 Kegiatan				
2	Penguatan Data Pangan Segar Aman	1 Kegiatan					1 Kegiatan			
2	Persentase Peningkatan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor	3,0%								
1	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	698 Produk							Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan	
1	Sertifikasi dan Registrasi Keamanan Pangan Segar Pusat	230 Produk			54 Produk	57 Produk	60 Produk	59 Produk		
2	Sertifikasi dan Registrasi Keamanan Pangan Segar Daerah	468 Produk				150 Produk	168 Produk	150 Produk		
2	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK							NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	
1	Penyusunan NSPK Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan	3 NSPK			1 NSPK		1 NSPK	1 NSPK		

9. Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progre	Progres	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO	Status
			Parsial	Kumulatif	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
			[%]	[%]						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	90,5%								
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan							Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
1	Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Badan Pangan Nasional							1 Layanan		
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8 Layanan							Layanan Pemantauan dan	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Pangan Nasional				1 Dokumen					
2	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Utama				1 Dokumen					
3	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas				1 Dokumen					
4	Penyusunan Laporan Tahunan 2025				1 Dokumen					
5	Penyusunan Laporan Bulanan Tahun 2026				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
6	Penyusunan Laporan Triwulan Tahun 2026				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
7	Penyusunan Laporan Semesteran Tahun 2026					1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja							1 Dokumen		
3	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek Perencanaan dan Penganggaran	1 Kegiatan							Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek Perencanaan dan	
1	Pelaksanaan Pertemuan Perencanaan dan Penganggaran							1 Kegiatan		
4	Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pangan Nasional	6 Layanan							Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pangan Nasional	
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027				1 Dokumen					
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Angka Dasar 2027				1 Dokumen					
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2027					1 Dokumen				
4	Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif Tahun 2027					1 Dokumen				
5	Penyusunan TOR dan RAB Pagu Alokasi Anggaran 2027						1 Dokumen			
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran 2028						1 Dokumen			
2	Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti	100,0%								
1	Kerja Sama Bidang Pangan	1 Dokumen							Kerja Sama Bidang Pangan	
1	Penyusunan Kerja Sama di Bidang Pangan							1 Layanan		
3	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	3,64 Skala							NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan							Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi							1 Layanan		

10. Biro Keuangan Pengadaan dan Umum

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progre	Progres	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			Parsial [%]	Kumulatif [%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,6 Nilai							
1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen							Layanan Manajemen
1	Penyusunan Laporan Keuangan							1Dokumen	
2	Layanan Perbendaharaan								
3	Layanan Akuntansi dan Verifikasi								
4	Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)								
5	Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan								
2	Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	38 Daerah							Fasilitasi dan Pembinaan
1	Pendampingan dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
2	Indeks pengelolaan asset	3,79 Indeks							
1	Layanan BMN	1 Layanan						1 Layanan	Layanan BMN
1	Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
2	Layanan Pengelolaan BMN								
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,25 Nilai							
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Perkantoran
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai								
2	Administrasi Kegiatan								
3	Pemeliharaan Kendaraan								
4	Tenaga teknis lainnya								
5	Pengediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor								
6	Palantikan Jabatan								
2	Layanan Sarana Internal	24 Unit						24 Unit	Layanan Sarana Internal
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								
2	Pengadaan Kendaraan Roda 2								
4	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum	3,4 Skala							
1	Layanan Protokol	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Hukum
1	Layanan Keprotokoleran								
2	Layanan Umum	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Hukum
1	Layanan Rumah Tangga Pimpinan								
2	Layanan Dukungan Kesekretariatan								
3	Layanan Tata Usaha Biro								
4	Layanan Tata Usaha Pimpinan								
5	Layanan Persuratan dan Kearsipan								

11. Biro Organisasi SDM dan Hukum

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	91 Nilai							
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
	1 Layanan Manajemen Organisasi dan Tata laksana								
	2 Layanan Reformasi Birokrasi								
	3 Pengembangan Jabatan Fungsional								
2	Indeks Sistem Merit	275 Nilai							
1	Layanan Manajemen SDM	516 orang			129 orang	129 orang	129 orang	129 orang	Layanan Manajemen SDM
	Layanan Manajemen SDM Internal								
2	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pratama								
3	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Administrator								
4	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengawas								
3	Indeks Reformasi Hukum	92 Nilai							
1	Layanan Hukum	1 Layanan						1 Layanan	Layanan Hukum
	1 Layanan Hukum								
	2 Layanan Advokasi Hukum								
	3 Layanan Penguatan JDIH, IRH dan IKK								

12. Inspektorat

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Tingkat Maturitas SPIP	3 Level							
1	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama	4 Layanan							Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama
	1 Layanan Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1 Layanan			1 Layanan				
	2 Pelaksanaan Audit	1 Layanan				1 Layanan			
	3 Tindak Lanjut Audit	1 Layanan					1 Layanan		
	4 Layanan Internal	1 Layanan						1 Layanan	
2	Layanan Audit Internal Dalam Kota	4 Layanan							Layanan Audit Internal Dalam Kota
	1 Layanan Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	1 Layanan			1 Layanan				
	2 Reviu	2 Layanan				1 Layanan	1 Layanan		
	3 Pembinaan	1 Layanan						1 Layanan	
3	Layanan Audit Internal Luar Provinsi	16 Layanan							Layanan Audit Internal Luar Provinsi
	1 Pelaksanaan Audit	4 Layanan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	1 Tindak Lanjut Audit	4 Layanan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	1 Reviu	4 Layanan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	1 Penyusunan Laporan	2 Layanan				1 Layanan		1 Layanan	
	1 Pengawasan Kinerja	2 Layanan				1 Layanan		1 Layanan	

13. Pusat Data dan Informasi Pangan

No.	Indikator PK/Hasil Kerja/Tahapan Hasil Kerja	Target Hasil Kerja	Progres Parsial	Progres Kumulatif	Volume dan Waktu Capaian Tiap Tahapan Hasil Kerja				Keterkaitan Dengan RO
			[%]	[%]	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Rasio capaian nilai reformasi birorasi bidang transformasi digital	100,0%							
1	Data dan Informasi Pangan	1 Data						1 Data	Data dan Informasi Pangan
	1 Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi								
	2 Peningkatan Layanan Data dan Informasi								
	3 Tata Kelola SPBE								
2	Rasio capaian nilai reformasi birorasi bidang statistik sektoral	100,0%							
1	Sistem Informasi Pangan	1 Sistem							Sistem Informasi Pangan
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Pangan							1 Sistem	

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Revisi I ini disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah seiring dengan perkembangan penugasan yang diberikan. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan dari siklus akuntabilitas kinerja tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2026 ini diharapkan menjadi acuan agar mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, Rencana Aksi ini mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaian target kinerja serta rencana aksi implementasinya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya. Semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.